

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Amanina (2011) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Majapahit Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian kredit mikro kepada calon debitur pada bank mandiri telah sesuai dengan sistem pengendalian internal yang ada pada manual Kredit Mikro Bank Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan menunjukkan sistem pengendalian internal pada pemberian kredit di Bank Mandiri Semarang menunjukkan bahwa pengendalian terhadap proses pemberian kredit adalah efektif karena unsur-unsur pengendalian internal yang terdapat dalam proses pemberian kredit telah memadai dan telah dilaksanakan oleh manajemen.

Hizkia Assah (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kredit Mikro Indonesia”. Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang pencapaian target dan realisasi kredit mikro di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan bank umum di Indonesia dalam memberikan kredit mikro. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai target realisasi kredit mikro dan jumlah realisasi kredit yang berhasil disalurkan tahun 2007-2011. Metode analisis yang digunakan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya fluktuasi pada realisasi kredit mikro pada bank umum di Indonesia pada bank umum di Indonesia sejak tahun 2007-2011.

Papalagi (2013) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM Pada PT.BRI (PERSERO) Tbk Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan pada PT.BRI (Persero) Tbk Manado dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan metode analisis yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal.

Rosy (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Internal Control Dalam Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Usaha Mikro Pada Kospin Dua Dara”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara. Subjek dalam penelitian ini adalah staf dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara. Sedangkan objek penelitiannya adalah pengendalian internal dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara sudah cukup baik dan telah memenuhi sistem pengendalian internal yaitu ada dan dilaksanakannya prosedur pemberian kredit lingkungan pengendalian sumber daya manusia, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian dan pemantauan. adanya prosedur pemberian kredit yang jelas dari pengajuan permohonan kredit, penyelidikan berkas jaminan, melakukan survey, mempelajari berkas kredit hingga sampai dengan pencairan kredit.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Judul Hasil

Amanina

(2011)

Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi Kasus pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Cabang Majapahit Semarang). Pemberian kredit di Bank Mandiri Semarang menunjukkan bahwa pengendalian terhadap proses pemberian kredit adalah efektif.

Hizkia Assah

(2013)

Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kredit Mikro Indonesia.

Terjadinya fluktuasi pada realisasi Kredit Mikro pada Bank Umum di Indonesia sejak tahun 2007-2011.

Papalagi

(2013)

Penerapan SPI Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit UKM pada PT.BRI (Persero) Tbk Manado.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal.

Rosy

(2015)

Analisis Intenal Control Dalam Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Usaha Mikro pada Kospin Dua Dara.

Pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dua Dara sudah cukup baik dan telah memenuhi sistem pengendalian internal.

2.2 Telaah Literatur

2.2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Peran utama bank sebagai *finansial intermediate* maupun *institute of development*, atau usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank dan dari segi penyaluran dananya, sehingga bank tidak hanya memperoleh keuntungan yang besar bagi pemilik tetapi juga lebih diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut merupakan komitmen setiap bank yang ada di Indonesia.

Kasmir (2014; 25) mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2.2 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2011; 96) menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thamrin (2012; 162) kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan, dalam artian bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Abdullah dan Tantri (2012:163) mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2.2.3 Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit. Adapun unsur-unsur kredit menurut (Kasmir, 2010) adalah :

- a. Kepercayaan adalah suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
- b. Kesepakatan yaitu meliputi kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.
- d. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. Balas Jasa merupakan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal

dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan.

2.2.4 Tujuan Kredit

Pemberian kredit memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2011; 105) adalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.2.5 Fungsi Kredit

Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang modern, banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu di ikut sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini menyebabkan, bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Dalam garis besar fungsi kredit menurut (Rivai, 2013; 200) di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal/ uang.

b. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.

e. Alat stabilitas ekonomi.

f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan modal.

g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

2.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Dalam proses pemberian kredit kepada nasabah harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P sebagaimana menurut (Abdullah dan Tantri, 2012), untuk mendapatkan penilaian kredit terhadap kriteria calon nasabah dapat dilakukan dengan analisis 5C, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercemin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan *social standing* nya.

2. Capacity

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal kerja apakah dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba).

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan.

Selain menggunakan penilaian 5C, menurut (Abdullah dan Tantri, 2012)

penilaian pemberian kredit dapat menggunakan 7P, yaitu sebagai berikut :

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon nasabah dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

2. *Party*

Mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.

3. *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.7 Sistem Pengendalian Internal

2.2.7.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif.

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Mulyadi (2013; 163) mendefinisikan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalambank tersebut.

Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank. Evaluasi sistem pengendalian internal pemberian kredit harus sering dilakukan sehingga apabila ada suatu penyimpangan atau kesalahan dapat segera diketahui.

Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur-unsur pokok, menurut Mulyadi (2010; 164) :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Komponen sistem pengendalian internal menurut COSO (*Commitee of Sponsoring Organizations*) ada 5 yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (*Internal Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah atmosfir dimana manajemen dan karyawan melaksanakan kegiatannya dan menunaikan tanggung jawabnya untuk mengendalikan organisasi. Lingkungan pengendalian yang efektif adalah lingkungan dimana terdapat orang-orang kompeten yang memahami tanggung jawabnya dan batasan atas wewenang, mengetahui, menghayati dan memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal yang tepat dengan cara yang benar, dan mempunyai komitmen untuk mengikuti kebijakan, prosedur, dan standar etika organisasi.

2. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.

3. Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*)

Penaksiran risiko adalah isidentifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi dalam suatu perusahaan haruslah memadai, hal ini dimaksudkan agar mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Pemantauan harus dilaksanakan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal.

2.2.7.2 Unsur Sistem Pengendalian Internal

Unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan menurut Mulyadi (2010;164),

adalah :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencacatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan hutang, pendapatan dan biaya. Untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencacatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :

a. Penggunaan formulir

b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*)

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.

d. Perputaran jabatan (*job rotating*)

e. Pembentukan unit organisasi

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh :

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.

b. Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

2.2.7.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian, diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut (Mulyadi, 2010) menyatakan bahwa tujuan pengendalian internal adalah :

1. Menjaga kekayaan organisasi.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

3. Mendorong efisiensi.

4. Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen.

2.2.7.4 Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perbankan

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya, serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia Tahun 2003, seperti dilansir oleh Amanina (2011;10), penerapan sistem pengendalian internal dalam perbankan meliputi :

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian

a. Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian internal.

b. Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

c. Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.

d. Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian internal telah dilaksanakan oleh

pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.

2. Identifikasi dan penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain :

- a. Perubahan kegiatan operasional bank.
- b. Perubahan susunan personalia.
- c. Perubahan sistem informasi.
- d. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu.
- e. Perkembangan teknologi.
- f. Perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukum yang berlaku.

3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. kegiatan pengendalian antara lain sebagai berikut :

- a. Kaji ulang kinerja operasional.
- b. Kaji ulang manajemen.
- c. Pengendalian sistem informasi.
- d. Pengendalian aset fisik.
- e. Dokumentasi.
- f. Pemisahan fungsi.

4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi

- a. Proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya.
- b. Sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko.
- c. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- d. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal.
- e. Sistem pengendalian internal bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

5. Pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

- a. Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektifitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal.
- b. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal.
- c. Bank harus menyelenggarakan audit internal yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal.

2.2.8 Prosedur Pemberian Kredit

2.2.8.1 Permohonan Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahapan yang harus dilakukan sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut (Kasmir,2012;143)

sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini nasabah mengajukan permohonan kredit yang di cantumkan dalam suatu proposal. Dengan dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi :

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus serta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan dan relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
- 2) Tujuan pengajuan kredit apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan perusahaan baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam hal ini nasabah menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan 3 tahun terakhir. Jika hasil analis tidak sesuai dengan pengajuan kredit, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada nasabah.
- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci caracara nasabah dalam membayar kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau hasil usaha lainnya.
- 5) Jaminan kredit. Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti agar tidak sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya.

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi :

1) Akte Notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau yayasan.

2) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika masa berlaku habis dapat diperpanjang kembali.

3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor pokok wajib pajak, dimana setiap pemberian kredit yang terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP.

4) Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir.

2. Penyelidikan Berkas Jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan nasabah sudah lengkap dan sesuai sesuai persyaratan, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum sesuai, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit sebaiknya dibatalkan.

3. Wawancara Awal

Merupakan penyidikan kepada calon nasabah secara langsung. Tujuannya adalah untuk menyakinkan bank apakah berkas-berkas yang diserahkan tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan secara langsung dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka harus mempersiapkan administrasinya. Keputusan kredit yang akan diumumkan biasanya mencakup: jumlah uang yang diterima, jangka waktu, dan biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan Akad Kredit/ Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit., sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan nasabah secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diebrikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat perjanjian lainnya yang dianggap perlu dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran / Penarikan Dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening nasabah sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

a. Sekaligus

b. Secara bertahap.

2.3 Kerangka Konseptual

Pemberian kredit memiliki sebuah risiko yaitu adanya kredit macet. Masalah keamanan kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pemberi kredit, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan atau diperlukannya suatu pengendalian yang dapat menunjang efektifitas pemberian kredit.

Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam pemberian kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam perbankan tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri, perbankan melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit.

Berdasarkan teori tersebut kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Konseptual

Analisis Pengendalian Internal

pada Bank

Standar Prosedur Kredit

Korporasi Bank Jatim

(Manual Produk Kredit

Korporasi Bank Jatim)

Pengendalian COSO :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Kegiatan Pengendalian
 3. Penaksiran Risiko
 4. Informasi dan Komunikasi
 5. Pemantauan
- Analisis Penerapan SPI Kredit Korporasi
dengan Pengendalian COSO
Kesimpulan